

BAB 4

KESIMPULAN

4. 1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Pencemaran nama baik menurut hukum pidana sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebagai suatu perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel agar diketahui orang banyak. Sedangkan menurut UU ITE, pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu pencemaran nama baik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
2. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda- tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya

masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis mengusulkan alternatif yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Terkait dengan penerapan ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang- Undang ITE, alternatif yang dapat dilakukan oleh penegak hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal terjadi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan merujuk pada putusan terdahulu dengan mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* sehingga penyelesaian perkara pencemaran nama baik tidak selalu berakhir pada pemidanaan pelaku tindak pidana.
2. Dalam hal menentukan subjek hukum pertanggungjawaban pidana, sebaiknya diberlakukan asas kesalahan dan asas pernyataan agar pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.